



RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2026

KONSULTASI PUBLIK

Tema:

“Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah dan
Pemerataan Infrastruktur Pembangunan yang
Berkelanjutan”

Plt. Kepala BAPPEDA

Sy. Vanesa Vilna SIS, S.E., M.M.

TENGGARONG, 10 FEBRUARI 2025



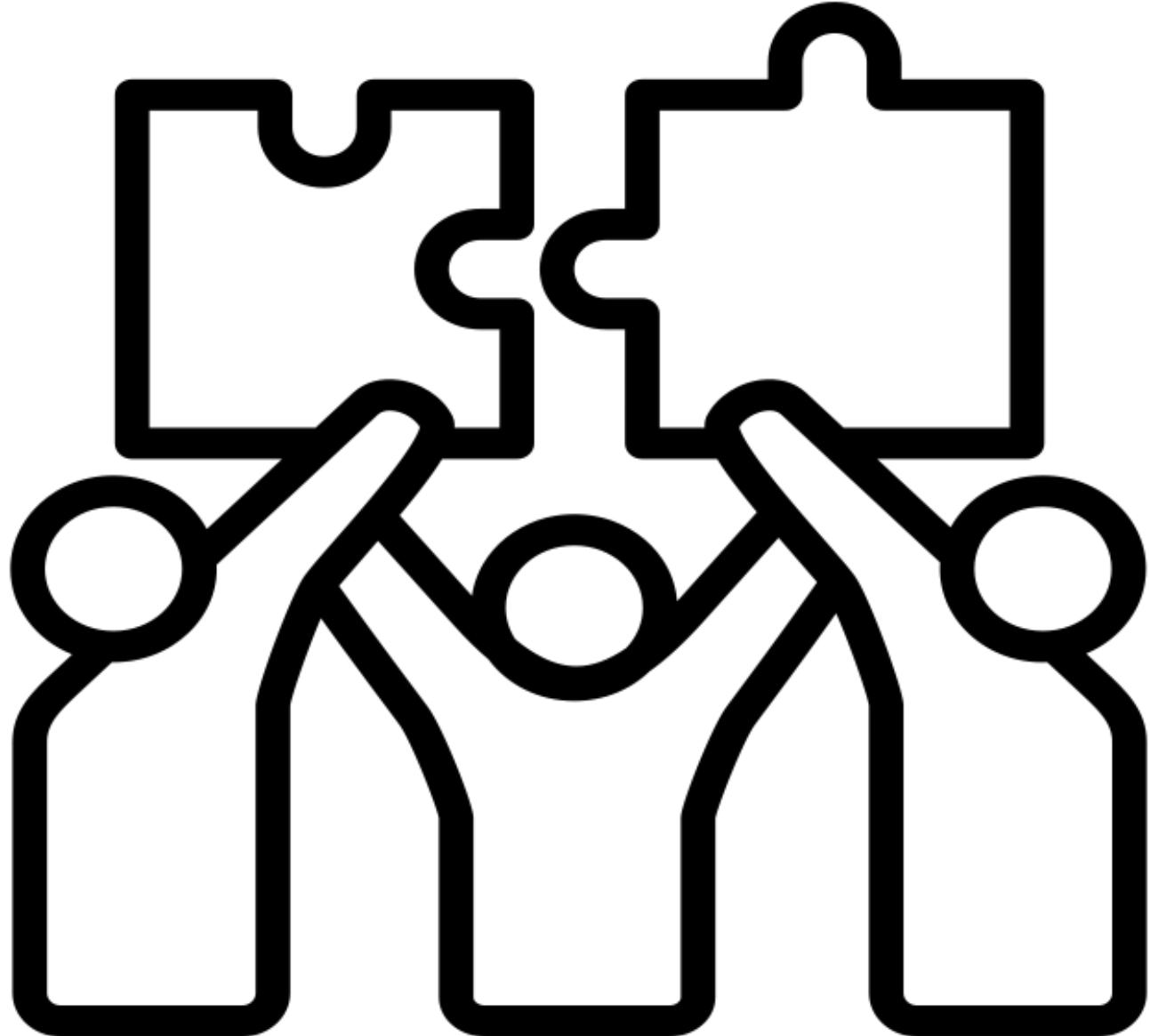
PENDAHULUAN





Konsultasi Publik

Merupakan Forum menjaring informasi, saran dan masukan dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka mempertajam analisis permasalahan dan perumusan tema, prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2026.

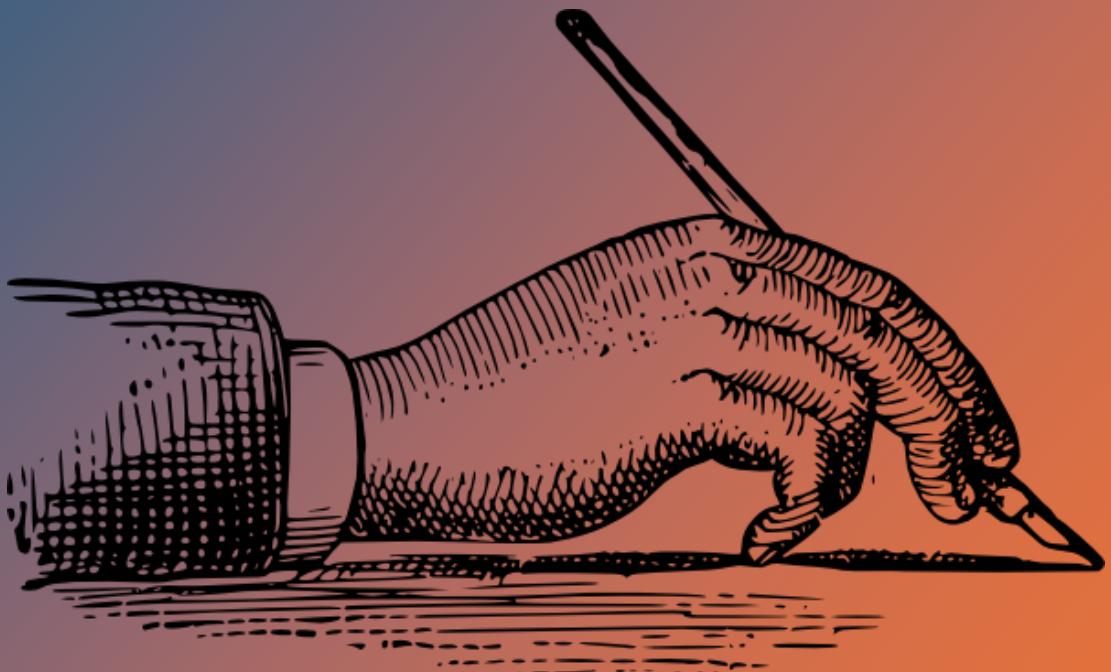




Dasar Hukum Permendagri 86/2017

- **Pasal (80):**

Rancangan awal RKPD dibahas bersama dengan **kepala Perangkat Daerah** dan **pemangku kepentingan** dalam forum konsultasi publik untuk **memperoleh masukan dan saran penyempurnaan**.



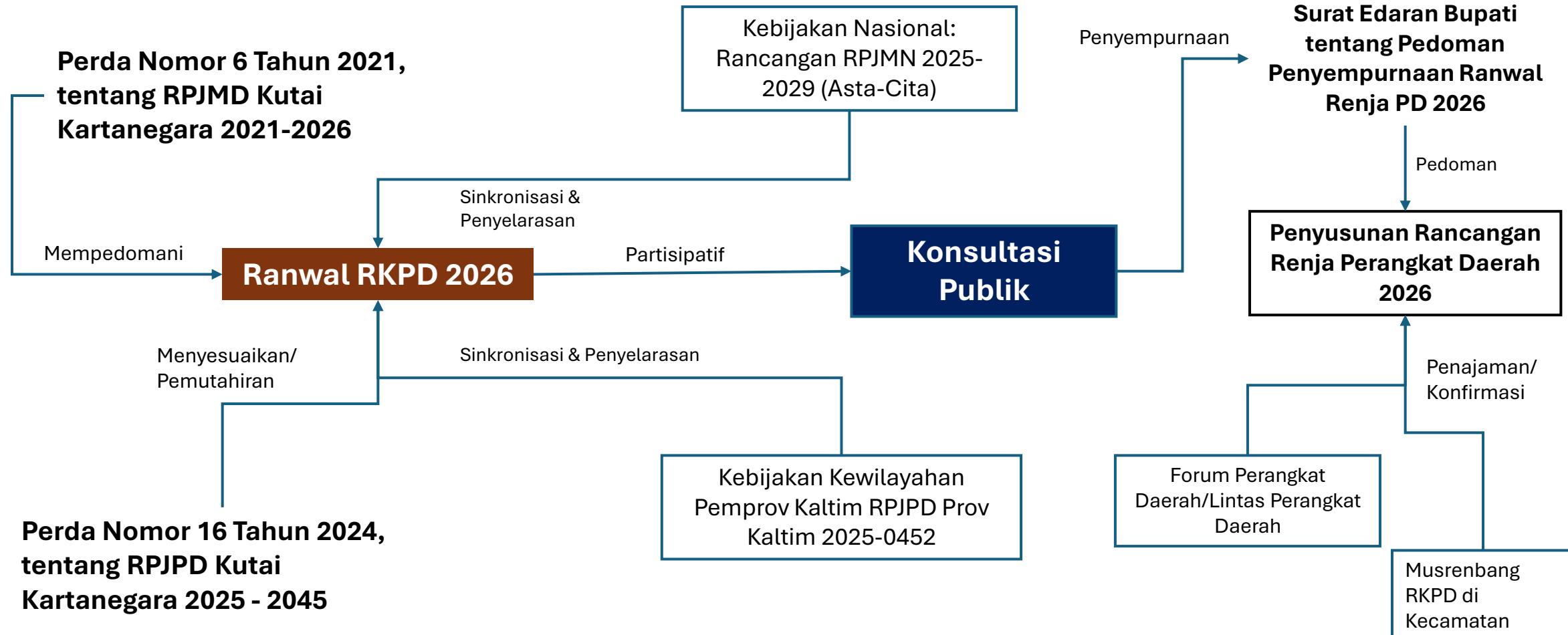
Output

Permendagri 86/2017

Berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah/Kepala BAPPEDA dan Kepala Perangkat Daerah serta perwakilan masyarakat yang hadir pada konsultasi publik.



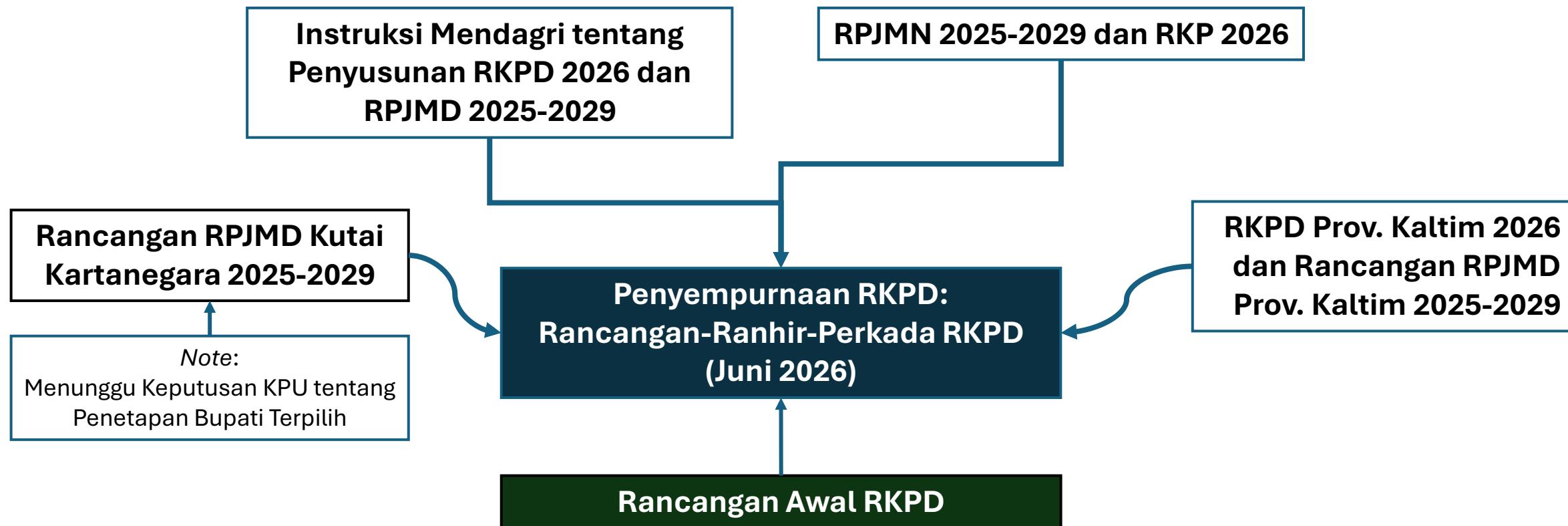
Kerangka Logis Subtansi Ranwal RKPD 2026





Tahapan Penyesuaian Pasca Konsultasi Publik

Penyesuaian dengan Kebijakan Nasional dan Regional





JANUARI

1. Penyusunan Kamus Usulan Masyarakat dan POKIR **(02 s.d. 10)**
2. Pembekalan dan Pendampingan Penyusunan RKPD 2026 pada SIPD RI di Pusdatin Kemendagri **(12-14)**
3. Orientasi RKPD 2026 **(16)**
4. Penyusunan Ranwal RKPD 2026 **(Des 2024 s.d. 31 Jan 2025)**
5. Penyusunan Ranwal Renja 2026 **(Des 2024 s.d. 31 Jan 2025)**
6. Input Ranwal Renja PD pada **SIPD RI** **(27-31)**
7. Input Usulan POKIR DPRD **(10 Jan-20 Maret)**
8. Verifikasi Input Usulan POKIR DPRD **(10 Jan-21 Maret)**

MARET

1. Pelaksanaan Forum PD/Lintas PD **(3-14)**
2. Input Rancangan RENJA PD di SIPD/eRPJMD **(10-19)**
3. Verifikasi Rancangan RENJA PD **(19-21)**
4. Penyusunan Rancangan RKPD 2026 **(21-25)**
5. Pelaksanaan MUSRENBANG Rancangan RKPD **(27)**

Jadwal Penyusunan RKPD 2026 Permendagri 86/2017

MEI

1. Reviu Inspektorat **(2-12)**
2. Evaluasi Provinsi Kaltim **(13-23)**
3. Penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD 2026 Paska Evaluasi Provinsi **(26-30)**

JULI

1. Penetapan PERBUP Renja PD 2026 **(Juli 2025)**

FEBRUARI

1. Sosialisasi Pedoman Musrenbang Kecamatan Tahun 2026 **(4)**
2. Pelaksanaan Konsultasi Publik **(10)**
3. Surat Edaran Penyusunan Rancangan RENJA PD 2026 **(11)**
4. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan **(11 s.d 20)**
5. Input Usulan Masyarakat di SIPD RI **(17 Januari s.d 21 Februari)**
6. Verifikasi Input Usulan Masyarakat **(17 Januari s.d 28 Februari)**
7. Paparan Camat Hasil Musrenbang Kecamatan **(25 s.d 27)**

APRIL

1. Verifikasi Validasi Hasil Input POKIR ke SIPD oleh TAPD **(8-11)**
2. Input Sub Kegiatan ke SIPD (Ranhir RKPD 2026) **(14-18)**
3. Rapat TAPD terhadap Ranhir RKPD 2026 **(21-22)**
4. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD 2026 **(23-30)**

JUNI

1. Penetapan PERBUP RKPD 2026 **(Juni 2025)**
2. Koordinasi ke Bagian Hukum Setda **(2-6)**
3. Perumusan Rancangan Akhir dan Verifikasi Rancangan Akhir Renja PD 2026 **(9-23)**
4. Koordinasi ke Bagian Hukum Setda **(16-31)**

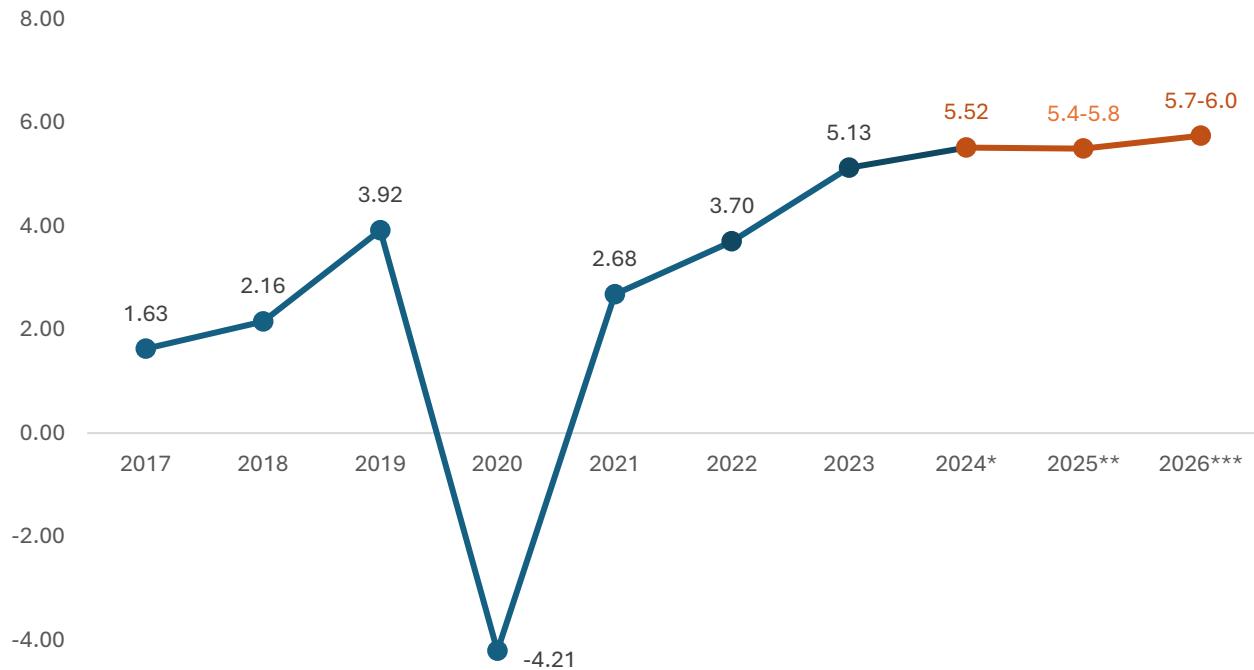
EVALUASI CAPAIAN SAMPAI DENGAN 2024





Evaluasi Capaian Pembangunan Daerah

Kinerja Perekonomian Daerah



*. Angka proyeksi

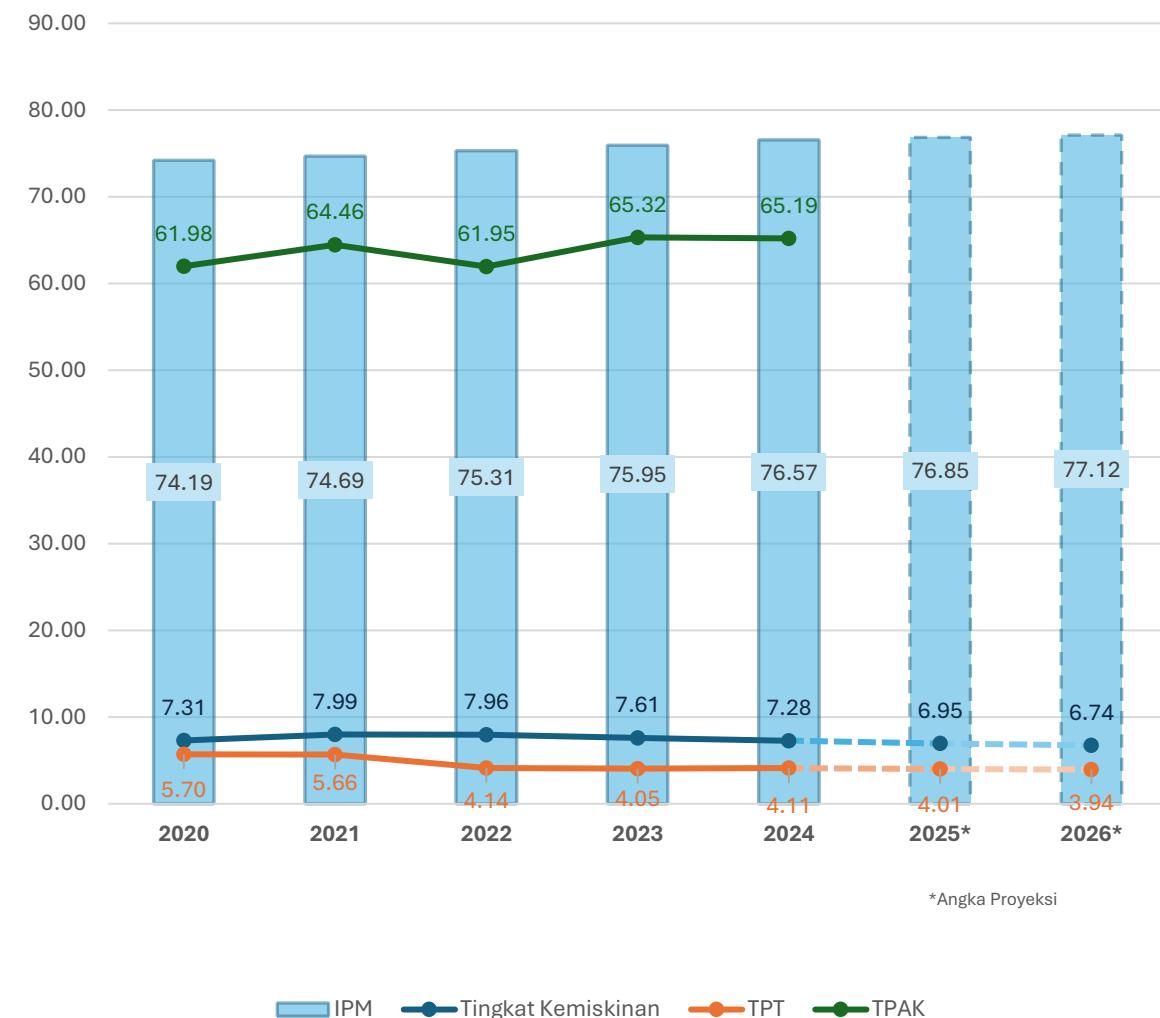
Perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan trend positif pada tahun 2024. Pada 2023, pertumbuhan tahunan PDRB tercatat sebesar 5,13%, sementara hingga triwulan III 2024, pertumbuhan ekonomi telah mencapai 5,55%. Ini mengindikasikan bahwa secara kumulatif, kinerja ekonomi tahun 2024 telah melampaui capaian tahun sebelumnya, meskipun data triwulan IV masih belum tersedia. Jika *trend* ini berlanjut, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara pada 2024 diproyeksikan akan melebihi 5,5%.

Dari sisi produksi, sektor pertambangan dan penggalian, pertanian, perikanan, kehutanan, serta konstruksi tetap menjadi kontributor utama dalam menopang pertumbuhan ekonomi daerah. Keberlanjutan investasi di sektor infrastruktur serta stabilnya aktivitas di sektor primer diyakini akan menjaga momentum pertumbuhan hingga akhir tahun.



Evaluasi Capaian Pembangunan Daerah Kinerja Pembangunan Sosial

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), merupakan gambaran dari efektifitas kinerja perekonomian daerah terhadap dampak sosial ekonomi masyarakat, secara umum IPM dan Kemiskinan menunjukkan *trend* positif kecuali TPT yang mengalami kenaikan dengan jumlah pengangguran meningkat yang disebabkan karena menurunnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2023: 65,32 % sedangkan 2024 menjadi 65,19 %.



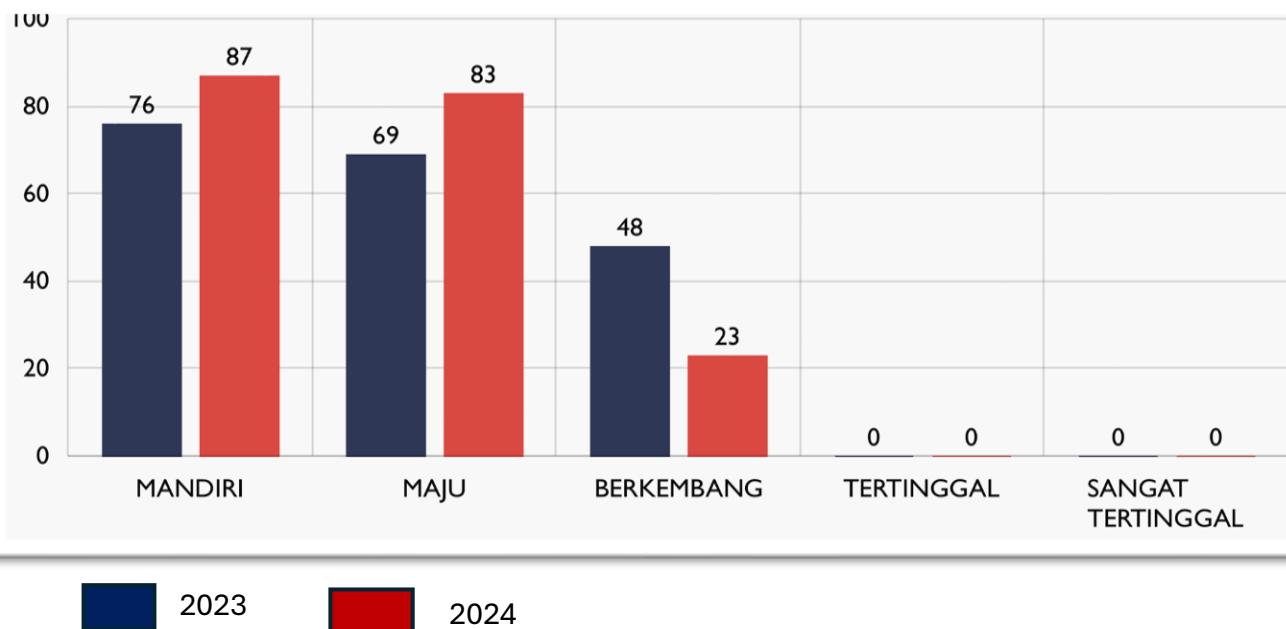
Evaluasi Capaian Pembangunan Daerah

analisis berdasarkan tema RKDP 2024

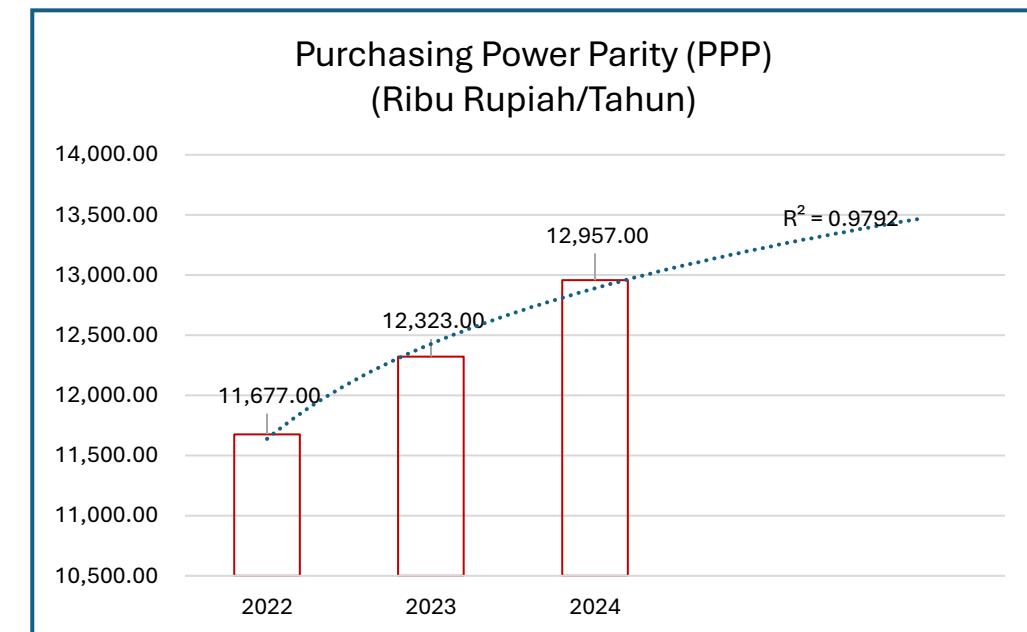
Tema Pembangunan 2024:

“Pengembangan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Desa dan Kecamatan”

Perkembangan Jumlah Desa Berdasarkan Kategori Indeks Desa Membangun:



Indikasi Keberhasilan Tema Pembangunan, dapat dilihat dari Kualitas Pembangunan Desa, yang ditunjukkan dengan Indeks Desa Membangun dan Meningkatnya Pengeluaran Perkapita Penduduk, dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 2 tahun ke depan.



ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN



Keterkaitan Isu Strategis Jangka Menengah (Rancangan Teknokratik RPJMD)

Isu Global

Pertanian Presisi dan Pengelolaan Pangan

Dampak Perubahan Iklim pada Ketahanan Pangan

Konstelasi kerja sama antarnegara memainkan peran krusial dalam mempengaruhi rantai pasok dan distribusi logistik global

Isu Nasional

Dampak Hilirisasi Mulai Terlihat Positif Bagi Perekonomian Indonesia;

Sinkronisasi Kebijakan Makro dan Sektoral

Penerapan Standar Sustainability yang Tinggi di Level Global

Tantangan Transmisi Energi, namun Ada Peluang untuk Pemerataan

Aging Population Negara Maju

Isu Provinsi Kaltim

Masih adanya kesenjangan kualitas dan daya saing sumber daya Manusia;

Masih lambatnya transformasi ekonomi dari basis SDA tidak terbarukan;

Belum meratanya infrastruktur dasar dan konektivitas yang belum terintegrasi;

Masih tingginya kesenjangan antar wilayah;

Belum optimalnya tata pemerintahan dan birokrasi yang professional dan akuntabel;

Penurunan kualitas lingkungan hidup di tengah upaya penurunan emisi GRK

Isu Kab. Kutai Kartanegara

Peningkatan Pelayanan dasar dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia;

Pengembangan ekonomi berkelanjutan berbasis sektor ekonomi non-ekstraktif

Pemerataan pelayanan infrastruktur;

Optimalisasi tata kelola dan birokrasi pemerintahan

Penguatan demokrasi, Keamanan dan Ketertiban masyarakat

Peningkatan ketahanan sosial dan pelestarian budaya

Pelayanan publik yang inklusif

Pelestarian lingkungan hidup berkelanjutan dalam Upaya peningkatan ketahanan daerah



Isu Strategis dan Permasalahan

RKPD 2026

PERMASALAHAN POKOK	ISU STRATEGIS
Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Pengembangan ekonomi berkelanjutan berbasis sektor ekonomi non-ekstraktif
Belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik	Optimalisasi tata kelola dan birokrasi pemerintahan, penguatan kehidupan berdemokrasi, dan perwujudan keamanan dan ketertiban berbasis pelayanan publik terdigitalisasi
Belum meratanya pelayanan infrastruktur dasar dan perumahan layak huni	Pemerataan pelayanan infrastruktur pembangunan yang berkualitas dan handal
Belum optimalnya pembangunan SDM yang merata dan kesejahteraan yang berkeadilan	Akselerasi peningkatan daya saing SDM yang sehat, cerdas dan sejahtera
Belum optimalnya ketahanan sosial dan pelestarian budaya dalam upaya menuju masyarakat berkebudayaan maju	Peningkatan ketahanan sosial dan pelestarian budaya
Meningkatnya potensi kerusakan lingkungan hidup sebagai dampak aktivitas ekonomi dan resiliensi bencana daerah	Pelestarian lingkungan hidup berkelanjutan dan optimalisasi tanggap bencana

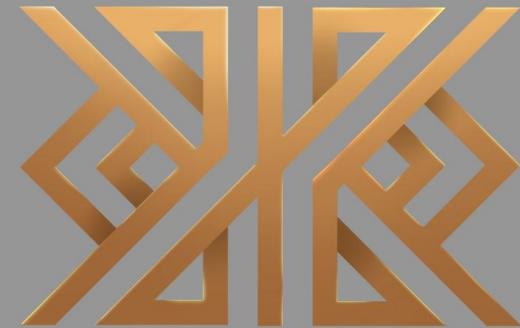
TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN 2026





RPJPD KUTAI KARTANEGERA 2025-2029

Perda Nomor 16 tahun 2024



KUKAR MAJU TANGGUH BERBUDAYA 2045

Pusat Pangan, Pariwisata,
Industri Hijau, Sejahtera dan
Berkelanjutan

ARAH KEBIJAKAN 2025-2029

1. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial;
2. Pengembangan hilirisasi dan pariwisata sebagai pondasi ekonomi baru non ekstraktif;
3. Pengembangan *smart governance* dan peningkatan profesionalisme SDM ASN;
4. Pembangunan pondasi demokrasi substansial dan peningkatan stabilitas ekonomi;
5. Pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan serta pengembangan resiliensi kebencanaan;
6. Pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan;
7. Pengembangan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan;
8. Pengembangan dasar sinergisitas dan kesinambungan pembangunan.



Tema Pembangunan

Ranwal RKPD 2026

Tema RKPD 2026:

**“Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah dan
Pemerataan Infrastruktur Pembangunan yang Berkelanjutan”**



Peningkatan pemenuhan dan pemerataan kualitas layanan kesehatan;

Peningkatan pemenuhan dan pemerataan kualitas layanan Pendidikan;

Pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan;

Penguatan regulasi dan tata kelola yang adaptif, konsisten dan implementatif;

Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik;

Penguatan nilai-nilai tradisional serta warisan budaya melalui pendekatan pembelajaran pendidikan sejak dini;

Penguatan kecamatan sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan infrastruktur desa yang berkualitas;

Pembangunan prasarana dan sarana koneksi (keterkaitan) wilayah.



Fokus Pembangunan Tahun 2026

No	Prioritas	Fokus	OPD Pelaksana
1	Peningkatan pemenuhan dan pemerataan kualitas layanan kesehatan;	Penyediaan SDM Tenaga Kesehatan dan Integrasi dukungan kebijakan terhadap pelaksanaan Program Nasional Makan Bergizi Gratis.	Dinas Kesehatan; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; DP2KB, DPMD
2	Peningkatan pemenuhan dan pemerataan kualitas layanan pendidikan;	Keterpaduan layanan pendidikan dalam menjamin keberlanjutan pendidikan dasar (SD-SMP) hingga ke pendidikan menengah dan tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kearsipan dan Perustakaan
3	Pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan;	Membangun kelembagaan dan sumber daya manusia yang kuat berdasarkan potensi dan karakteristik wilayah berbasis pendampingan dan kemitraan.	Dinas Pertanian dan Peternakan; Dinas Perkebunan; Dinas Kelautan dan Perikanan DPMD; Dinas PU, Dinas Ketahanan Pangan, Disperindag, Diskop-UKM.
4	Penguatan regulasi dan tata kelola yang adaptif, konsisten dan implementatif;	Penguatan pengawasan, perbaikan regulasi dan kelembagaan organisasi perangkat daerah dalam mengawal pelaksanaan arah kebijakan pembangunan yang terstruktur dan sistematis.	Sekretariat Daerah; Inspektorat; BKPSDM; Seluruh OPD Teknis Pelaksana Program Prioritas.
5	Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik;	Peningkatan kualitas jaringan internet dan fasilitasi layanan data dan informasi serta perizinan/non perizinan hingga ke kecamatan/desa/kelurahan.	DPMPTSP; Diskominfo; Kecamatan; Setda (Bag. Pemerintahan)
6	Penguatan nilai-nilai tradisional serta warisan budaya melalui pendekatan pembelajaran pendidikan sejak dini;	Pengembangan kapasitas lembaga pelestarian budaya dan membangun kolaborasi antara sekolah, perguruan tinggi serta masyarakat penggiat budaya dalam satu kesatuan skema kerja yang terintegrasi.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Pariwisata dan Ekraf
7	Penguatan kecamatan sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan infrastruktur desa yang berkualitas;	Penyediaan RDTR wilayah Kecamatan dan Tata Ruang Desa, pengembangan perumahan rakyat yang terjangkau dan optimalisasi pelimpahan kewenangan kecamatan dan dana transfer ke Desa.	Inspektorat; DPMD; Dinas PU; Dinas Perkim; DLHK; Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Kecamatan;
8	Pembangunan prasarana dan sarana konektivitas (keterkaitan) wilayah.	Penyediaan layanan transportasi perhubungan darat maupun perairan yang terintegrasi berbasis karakteristik wilayah	Dinas PU, Dinas Perhubungan, Dinas Perkim, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang



Target Makro Tahun 2025-2026

No	Indikator Makro	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Target 2025*	Target 2026*
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,95	76,57	76,85	77,12
2	Tingkat Kemiskinan (%)	7,61	7,28	6,95	6,74
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,05	4,11	4,01	3,94
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,13	5,52*	5,4-5,8	5,7-6,0
5	PDRB per Kapita (Juta Rp)	270,72	304.07*	320.80	337.53
6	Indeks Gini	0,284	0.278	0.276	0.274
7	Tingkat Inflasi (sister city Samarinda)	3,37	1,50“”	2.12	1.90

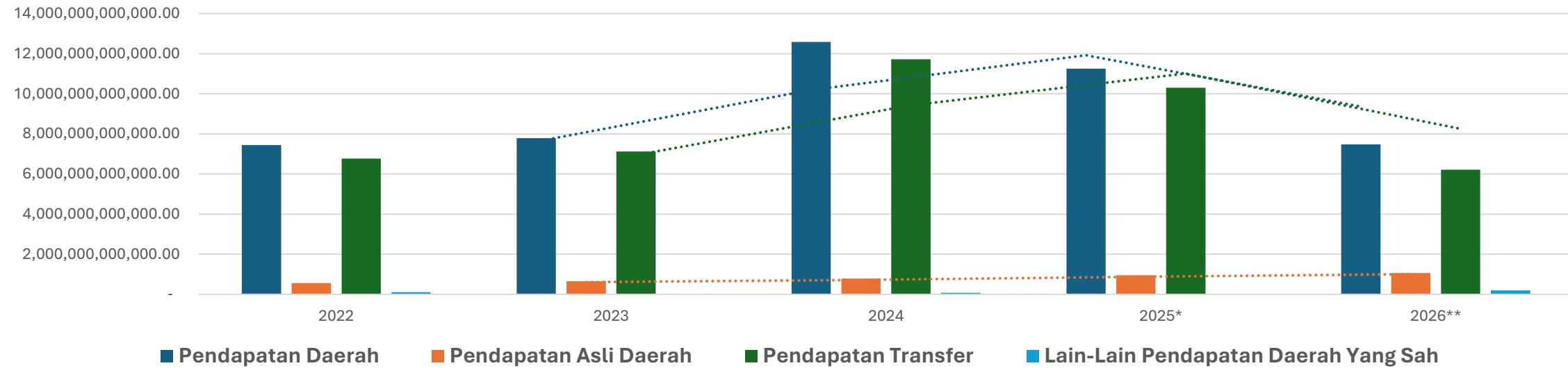
Sumber: BPS, *Angka proyeksi, “”Sister City Samarinda

KERANGKA PENDANAAN





Rancangan Awal Kerangka Pendapatan Daerah



	2022*	2023*	2024*	2025**	2026***
Pendapatan Daerah	7,443,525,130,275.86	7,787,223,822,360.59	12,586,549,868,076.60	11,250,250,000,000.00	7,472,498,708,108.55
Pendapatan Asli Daerah	567,757,276,457.12	651,136,413,747.50	787,600,555,382.88	953,088,447,204.00	1,062,389,550,000.00
Pendapatan Transfer	6,764,448,480,052.00	7,123,560,923,471.09	11,718,016,357,386.00	10,296,911,552,796.00	6,210,109,158,108.55
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	111,319,373,766.74	12,526,485,142.00	80,932,955,307.69	250,000,000.00	200,000,000,000.00

*LRA, ** APBD 2025, *** Analisis Bapenda



Kebijakan Belanja Program Prioritas Daerah



Alokasi Belanja Wajib
Mengikat;



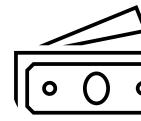
Standard Pelayanan
Minimal



Prioritas Daerah,
Program Dedikasi Visi-
Misi



Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan



Integrasi
Pendanaan:



Dukungan
Pemerintah Pusat
(APBN: Belanja
KL/DAK)



Integrasi dengan
Kebijakan Nasional



Dukungan
Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur
(APBD Prov: Belanja
SKPD/Bankeu)



Integrasi dengan
Kebijakan Pemprov
Kaltim



Kerjasama Pihak
Ketiga



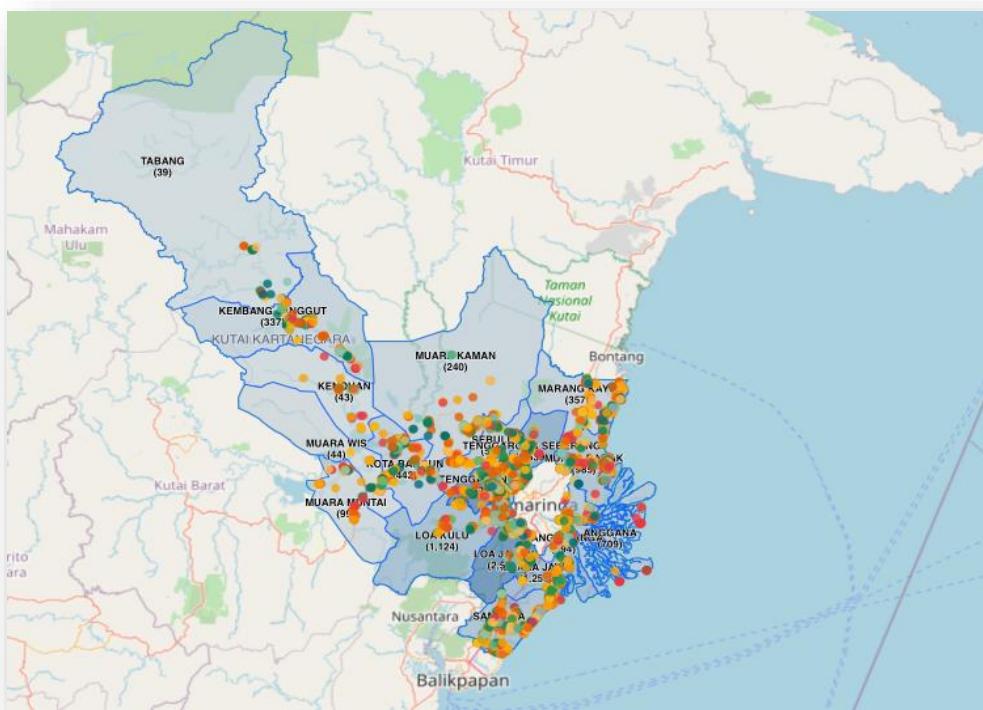
Optimalisasi
Integrasi CSR

IDENTIFIKASI PELUANG KERJASAMA DUNIA USAHA/SWASTA



Salah Satu Peluang Kerjasama Pihak Ketiga Dalam Pemerataan Pembangunan Infratsruktur

- Potensi Penyediaan Perumahan Rakyat



AREA	Total	%
SAMBOJA	952	6.60
MUARA JAVA	1256	8.71
SANGA-SANGA	294	2.04
LOA JANAN	2599	18.02
LOA KULU	1124	7.79
MUARA MUNTAI	99	0.69
MUARA WIS	44	0.31
KOTA BANGUN	442	3.06
TENGARONG	2672	18.52
SEBULU	593	4.11
TENGARONG SEBERANG	1639	11.36
ANGGANA	709	4.92
MUARA BADAK	985	6.83
MARANG KAYU	357	2.48
MUARA KAMAN	240	1.66
KENOHN	43	0.30
KEMBANG JANGGUT	337	2.34
TABANG	39	0.27
	14.424	100.00

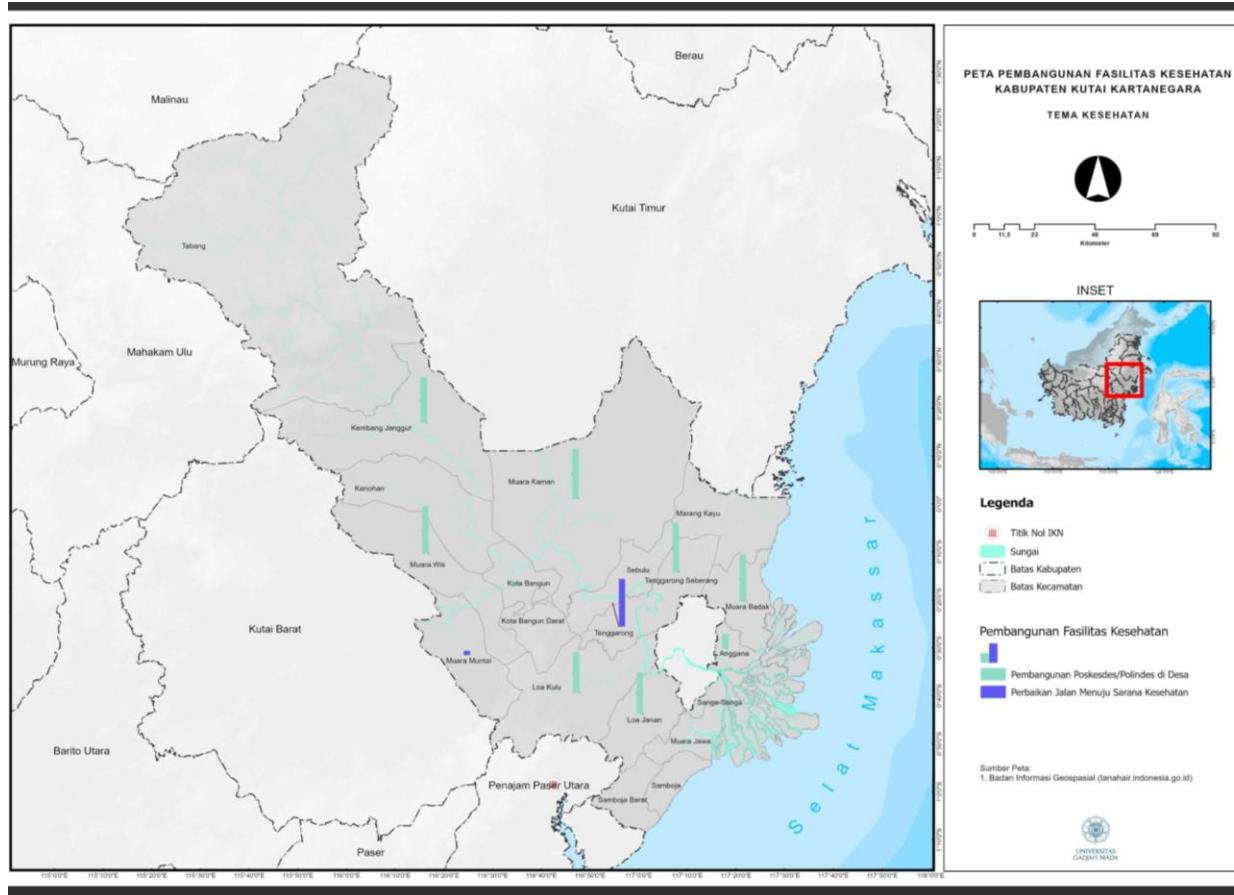
Analisis Rencana Kebijakan:

- Terdapat Potensi Sebesar 14.424 KK di Kutai Kartanegara yang belum memiliki Rumah Sendiri, tersebar di wilayah Kukar, sebaran terbanyak di wilayah Tenggarong, Loa Kulu, Loa Janan dan Tenggarong Seberang.
- Pengembangan Perumahan Rakyat, dengan pola kerjasama antara Pemkab dan Pihak Ketiga, diupayakan dapat terbangun di beberapa titik Lokasi di wilayah Kecamatan.
- Dinas PTSP, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, dan Dinas Perkim melakukan tindak lanjut dengan mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang dilaksanakan pada tahun 2026.

Arahan Intervensi Kerjasama Prioritas Daerah

Pada Program CSR berdasarkan Tema Pembangunan 2026

Berdasarkan Analisis Data Rekomendasi Indeks Desa Membangun dan Regsosek Tahun 2022



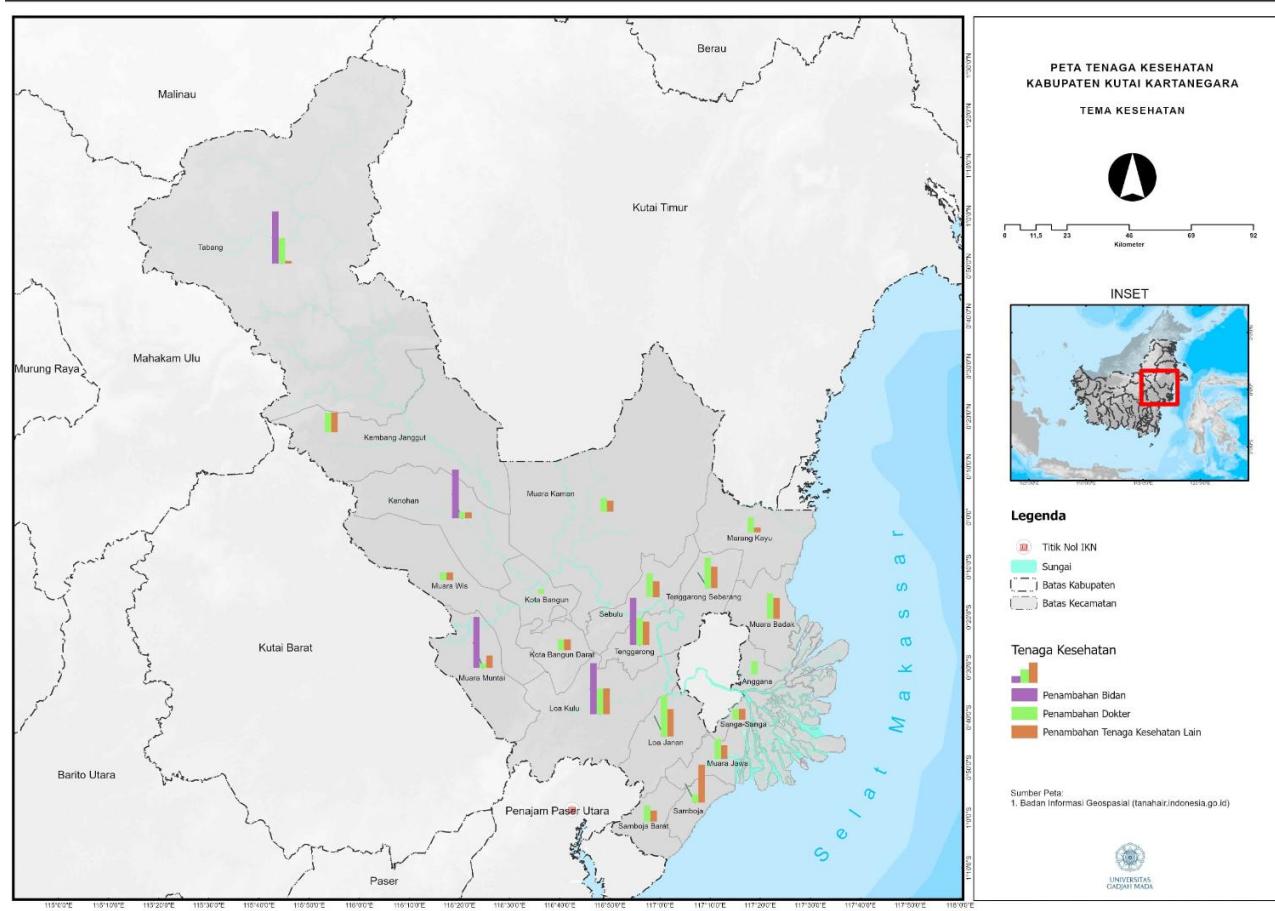
Tema Kesehatan:

- Pembangunan Poskesdes/Polindes di Desa***
- Perbaikan Jalan Menuju Sarana Kesehatan di Desa***

Arahan Intervensi Kerjasama Prioritas Daerah

Pada Program CSR berdasarkan Tema Pembangunan 2026

Berdasarkan Analisis Data Rekomendasi Indeks Desa Membangun dan Regsosek Tahun 2022



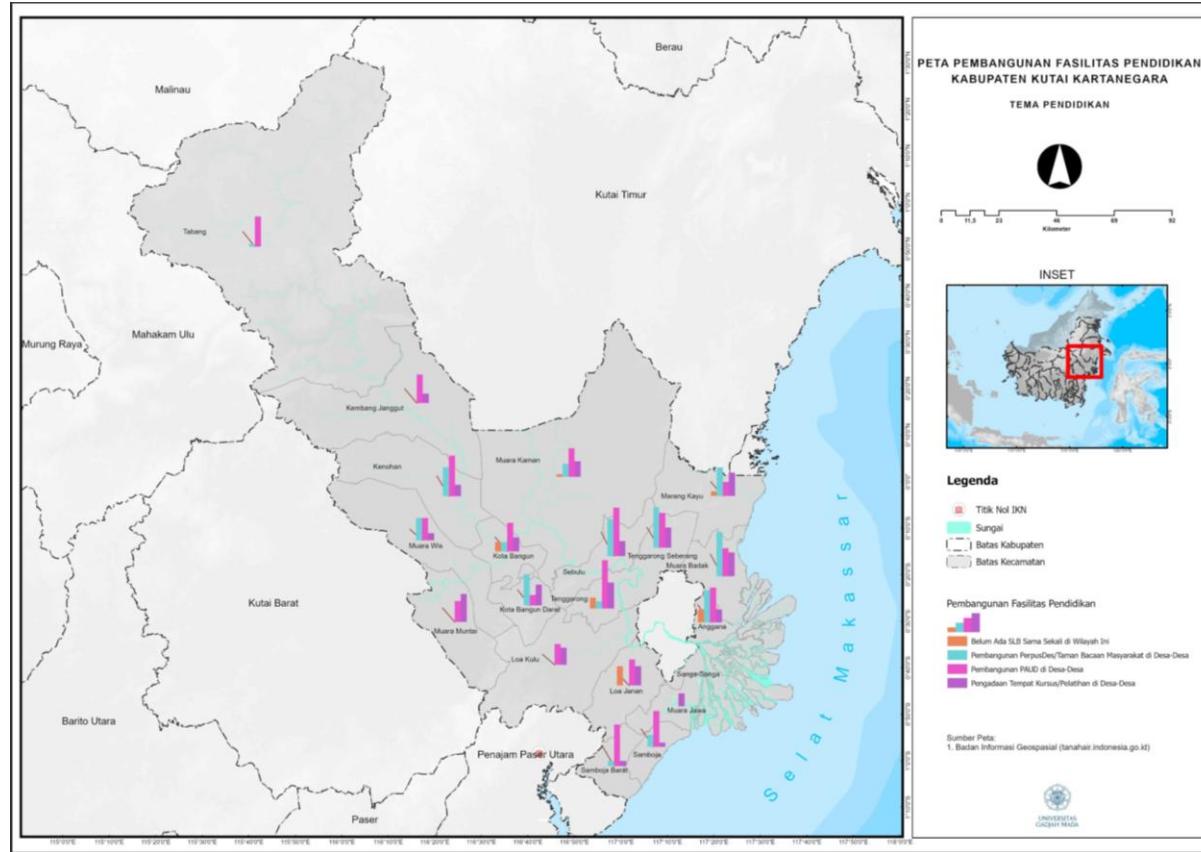
Tema Kesehatan:

1. Penambahan Bidan
2. Penambahan Dokter
3. Penambahan Tenaga Kesehatan Lainnya

Arahan Intervensi Kerjasama Prioritas Daerah

Pada Program CSR berdasarkan Tema Pembangunan 2026

Berdasarkan Analisis Data Rekomendasi Indeks Desa Membangun dan Regsosek Tahun 2022



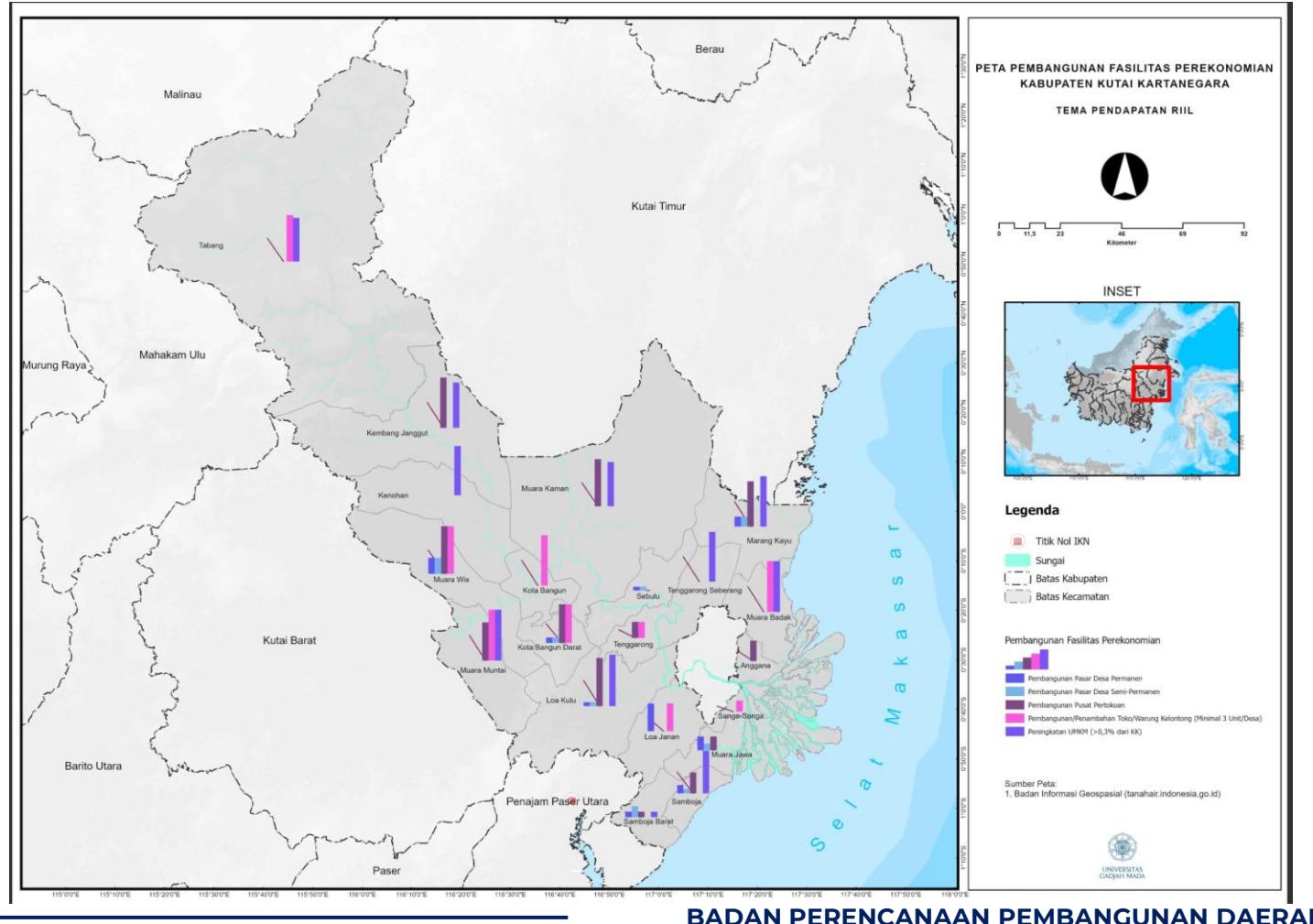
Tema Pendidikan:

1. Belum terdapat SLB;
2. Pembangunan PerpusDes/Taman Bacaan Masyarakat di Desa;
3. Pembangunan PAUD di Desa
4. Pengadaan Tempat Kursus di Desa

Arahan Intervensi Kerjasama Prioritas Daerah

Pada Program CSR berdasarkan Tema Pembangunan 2026

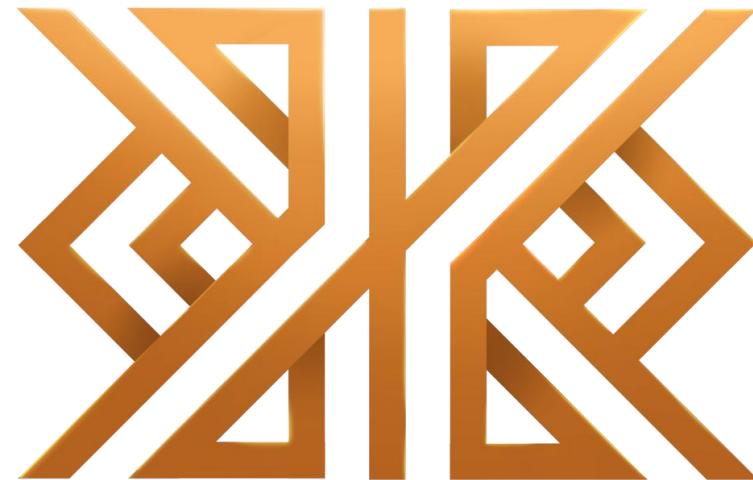
Berdasarkan Analisis Data Rekomendasi Indeks Desa Membangun dan Regsosek Tahun 2022



Tema Pendapatan Riil:

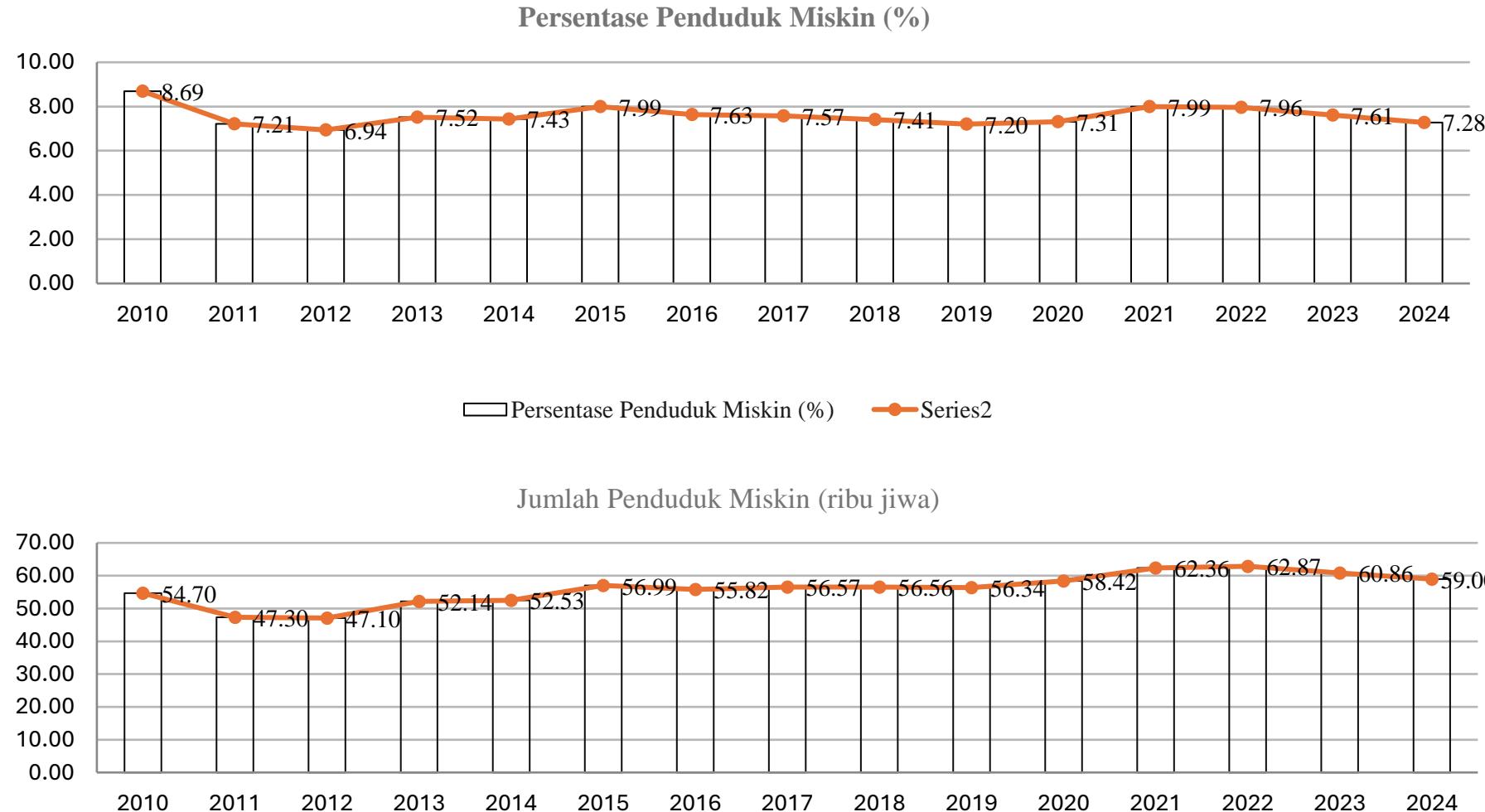
1. Pembangunan Pasar Desa Permanen
2. Pembangunan Pasar Desa Semi Permanen
3. Pembangunan Pusat Pertokoan
4. Pembangunan Warung/Toko Kelontong;
5. Peningkatan UMKM

ANALISIS FOKUS PENANGGULANGAN KEMISKINAN KUTAI KARTANEGERA 2026





Trend Kemiskinan Kutai Kartanegara



Semenjak 2011 s.d. 2024 Kemiskinan Kutai Kartanegara tidak bergerak di angka 7%, untuk lepas dari permasalahan ini diperlukan identifikasi permasalahan dan Solusi yang lebih tepat sasaran.



Capaian Pelaksanaan Program RBPK Tahun 2023 dan 2024

**pengurangan beban
pengeluaran
masyarakat;**

- P6 Progam PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR
- P9 Program PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET-A
- P10 Program PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET-B
- P11 Program PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET-C
- P12 Program BANTUAN ALAT BANTU AKSESIBILITAS
- P13 Program BANTUAN PANGAN
- P14 Program BABE IDAMAN (Bantuan Beras Idaman)
- P21 Program SANTUNAN SOSIAL KUKAR IDAMAN

2023 :
Rp. 116.187.616.040

Target Sasaran:
8.572 Orang
Realisasi : 8.124 PM
(94,77%),
P3KE : 5.588 PM,
Non P3KE : 2.536 PM

2024 :
Rp. 114.221.686.983

Target Sasaran:
6.127 Orang
Realisasi : 6.126 PM
(99,98%),
P3KE : 4.475 PM,
Non P3KE : 1.651 PM

**peningkatan
pendapatan
masyarakat;**

- P4 Program PONDOK PANGAN ETAM
- P5 Program NYAMAN Be'JUKUT
- P7 Program PENDIDIKAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI (KUM)
- P8 Program PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP
- P15 Program Klinik WPM (Wirausaha Pemuda Mandiri)
- P16 Program SABAR BERKEBUN
- P17 Program SAHABAT BERTANI
- P18 Program ETAM SIAP KERJA
- P19 Program YOK ETAM BE USAHA
- P20 Program JADI PENGUSAHA

Target Sasaran:
3.552 Orang
Realisasi : 3.106 PM
(87,94%),
P3KE 2.184 PM,
Non P3KE : 922 PM

Target Sasaran:
1.716 Orang
Realisasi : 1.714 PM
(99,8%),
P3KE : 1.207 PM,
Non P3KE : 507 PM

**penurunan jumlah
kantong-kantong
kemiskinan.**

- P1 Program Sanitasi Aman
- P2 Program Yok Baiki Rumah
- P3 Program Air Bersih

Target Sasaran:
2.022 Orang
Realisasi : 2.021 PM
(99,95%),
P3KE: 869 PM,
Non P3KE : 1.152 PM

Target Sasaran:
2.419 Orang
Realisasi : 2.419 PM
(100%),
P3KE : 776 PM,
Non P3KE : 1.643 PM



Rencana Program RBPK 2025

21 Program pada RBPK

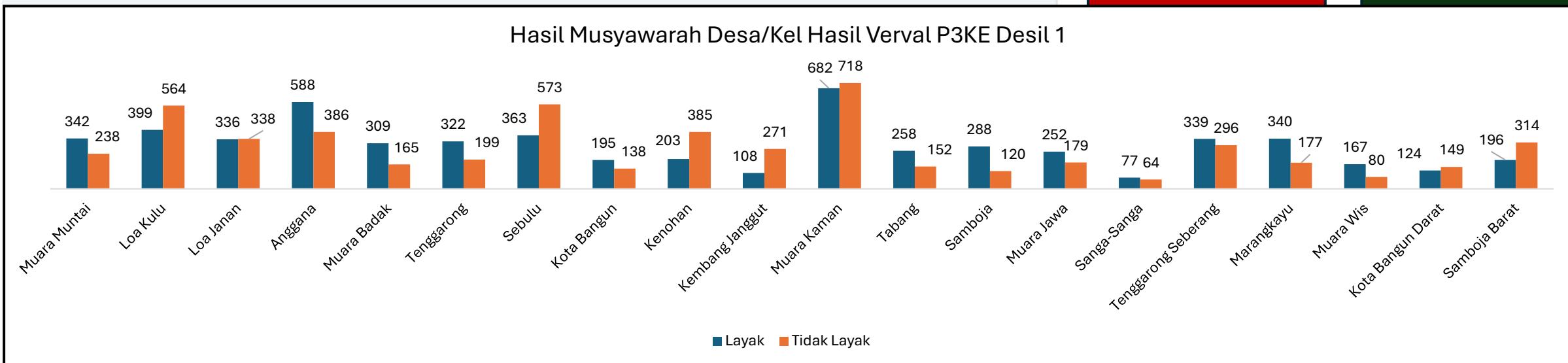
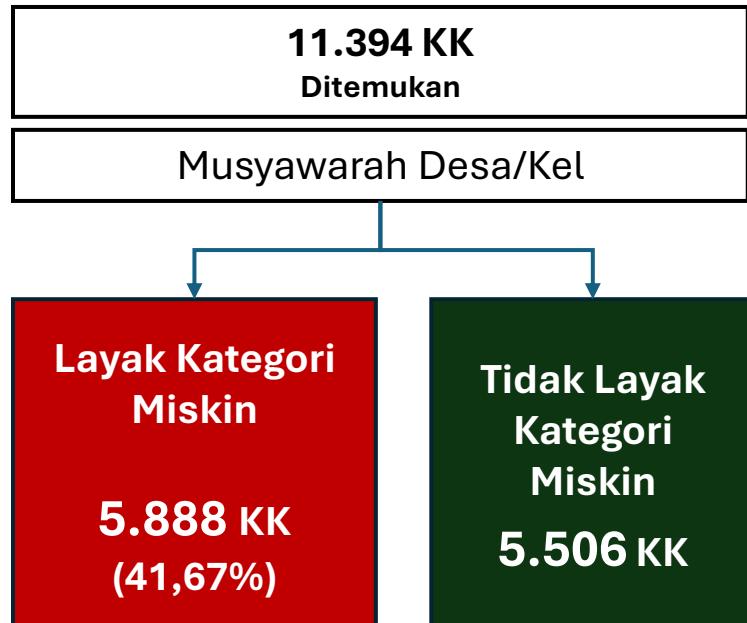
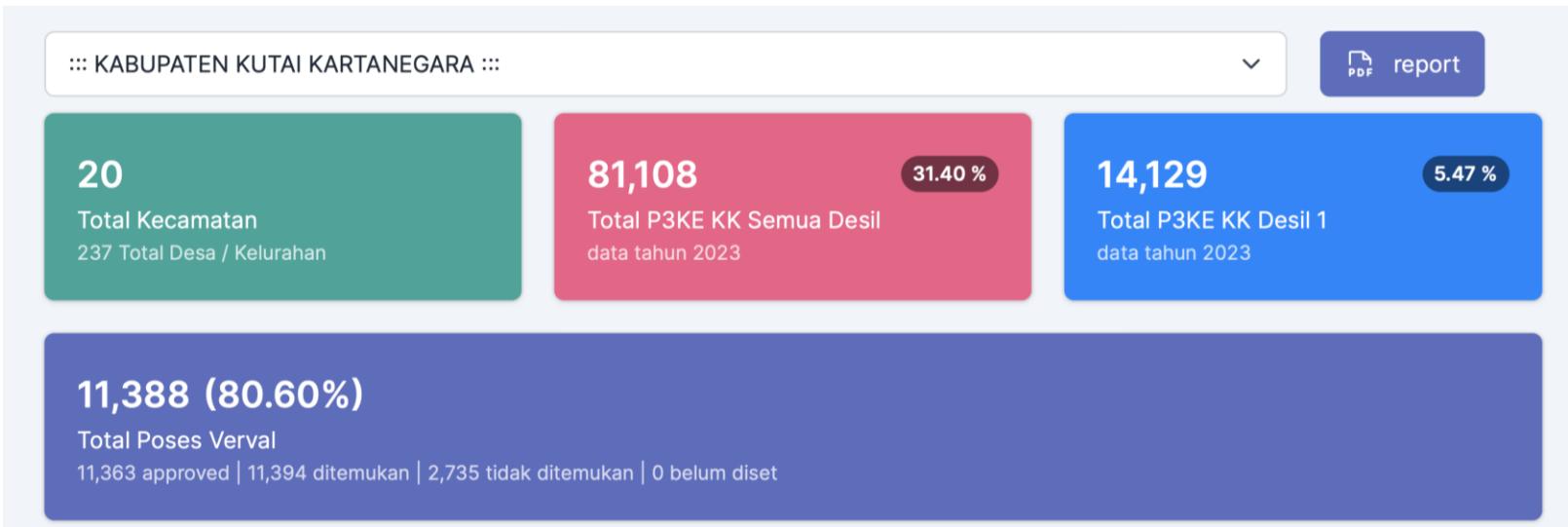
Target Penerima Manfaat : **15.437**

Alokasi Anggaran: **Rp. 105.942.199.980**





Verifikasi dan Validasi Data P3KE Desil 1 Tahun 2023

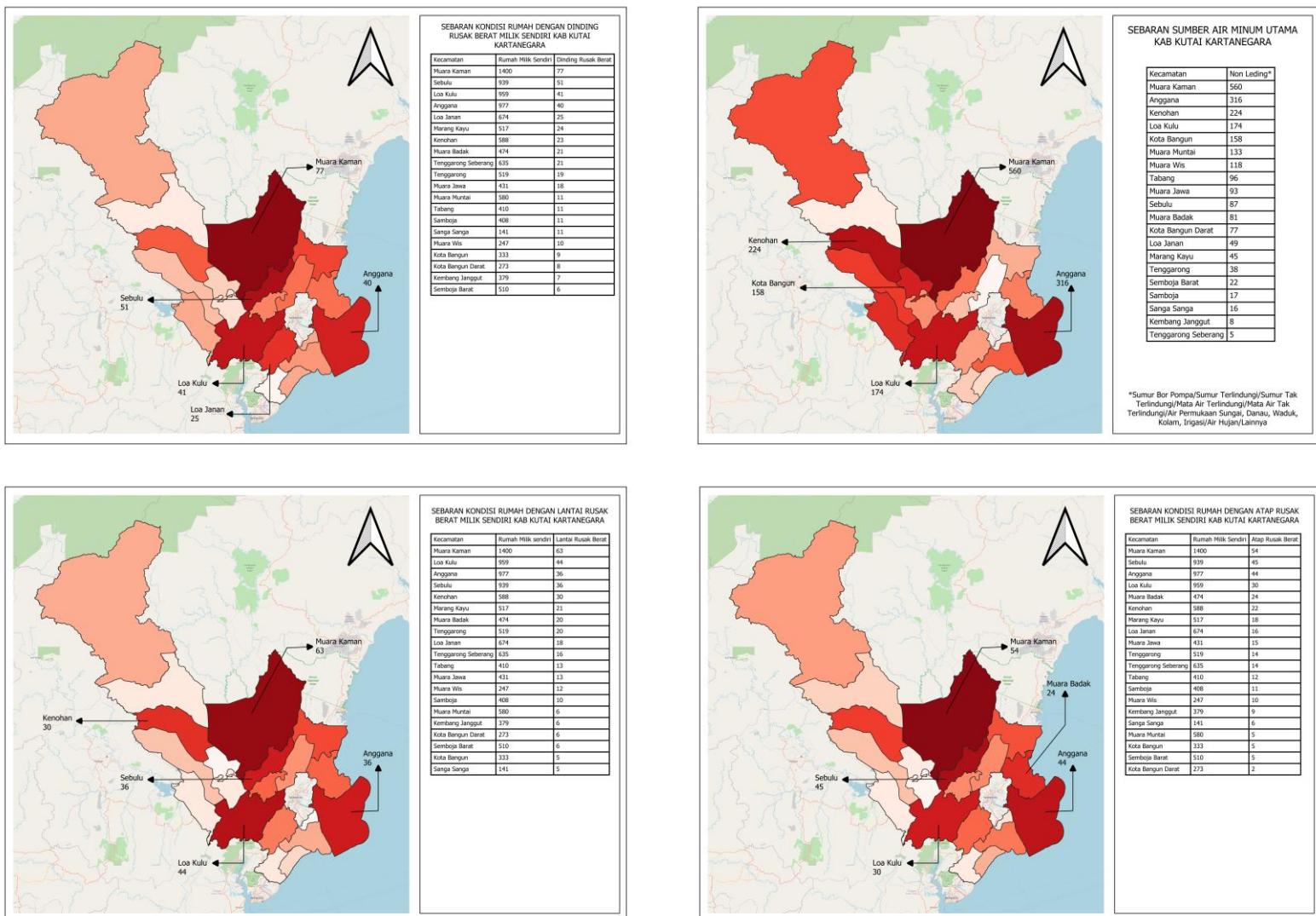




Analisis Hasil Verval P3KE Desil I Layanan Dasar Perumahan (Layak Kategori Miskin)

Secara Umum Masalah Kemiskinan Untuk Indikator Perumahan, sebagian permasalahan terpusat pada lima Kecamatan:

1. Muara Kaman
2. Loa Kulu
3. Anggana
4. Sebulu
5. Kenohan



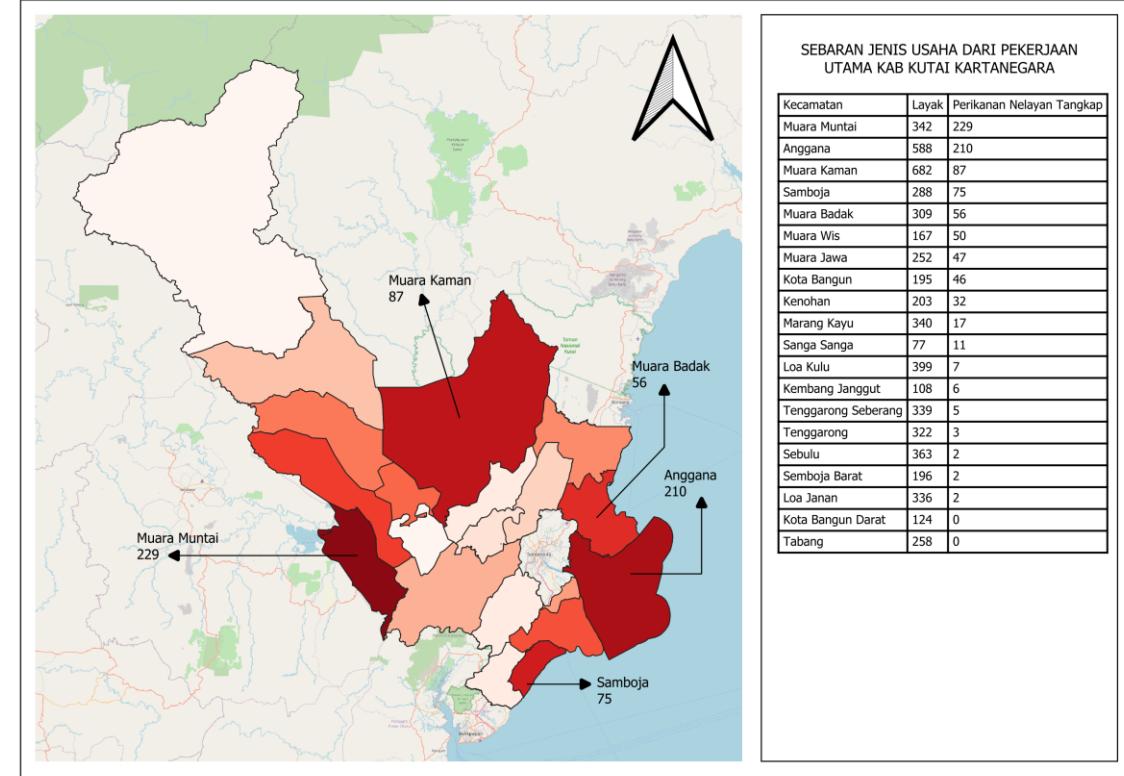
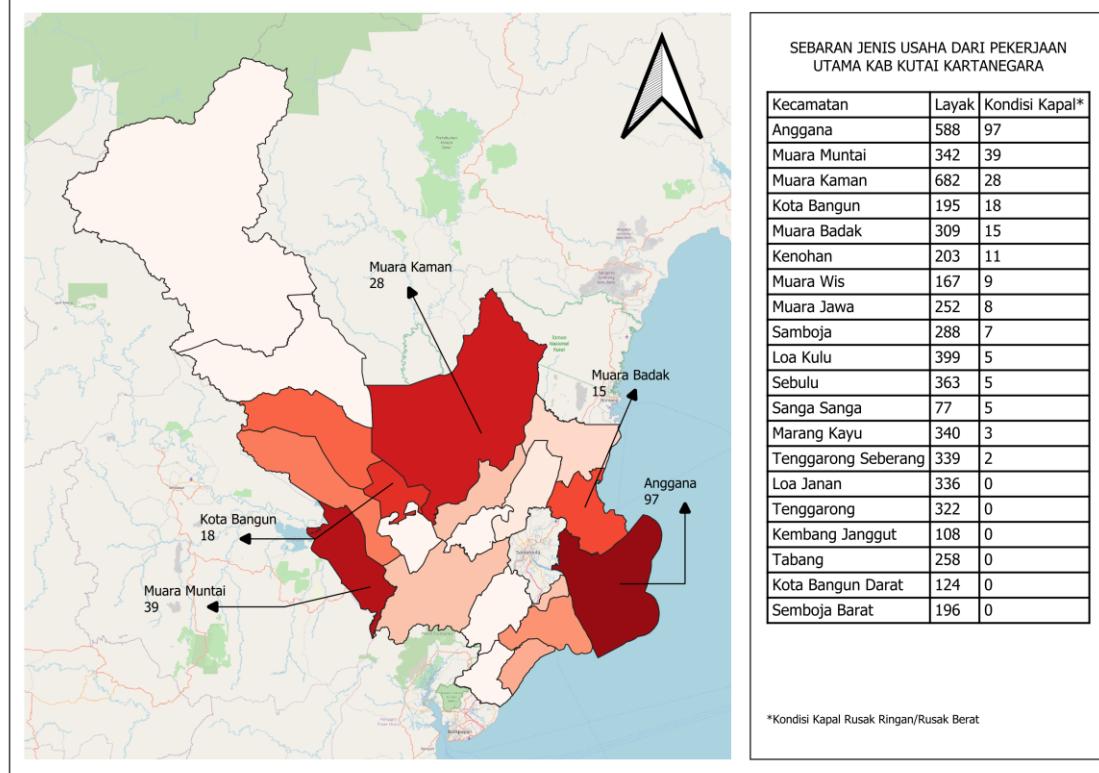


Analisis Hasil Verval P3KE Desil I

Sektor Nelayan

(Layak Kategori Miskin)

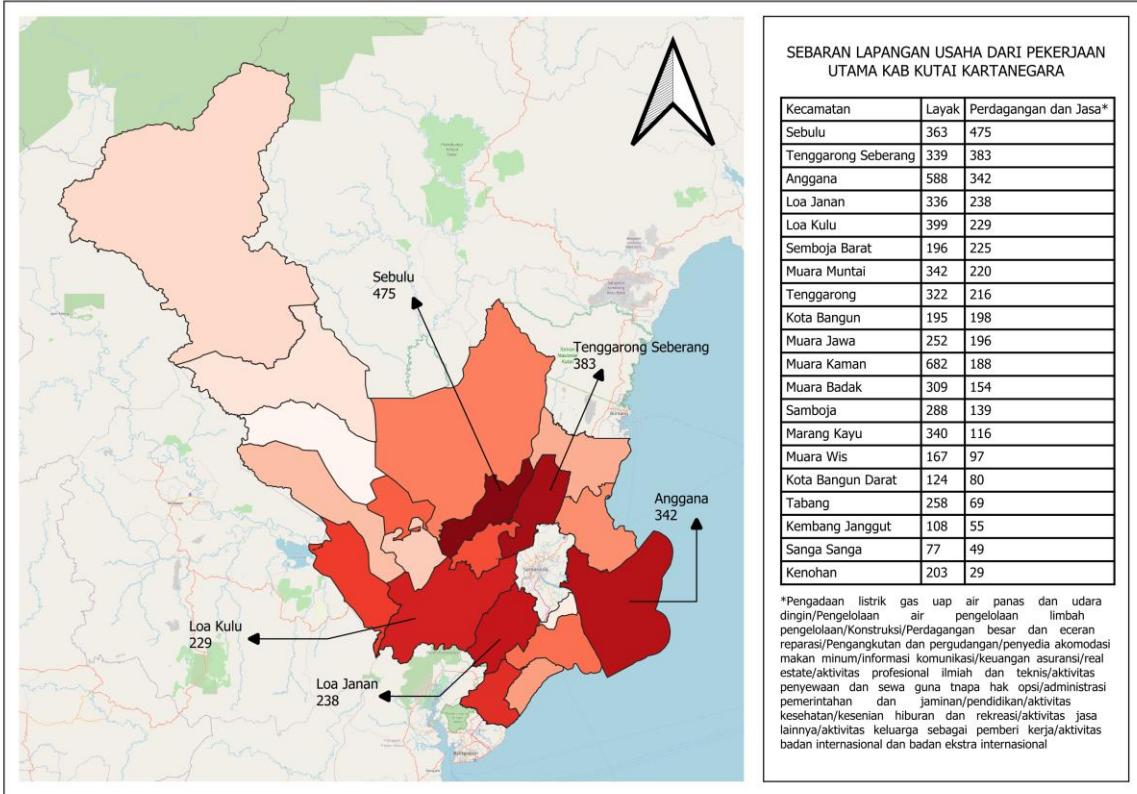
Kondisi penduduk yang bekerja di sektor perikanan tangkap/nelayan dengan kategori miskin dan sebagian besar dengan kondisi kapal yang rusak, tertinggi berada pada kecamatan: Anggana, Muara Muntai, Muara Kaman, Kota Bangun, Samboja, Muara Badak



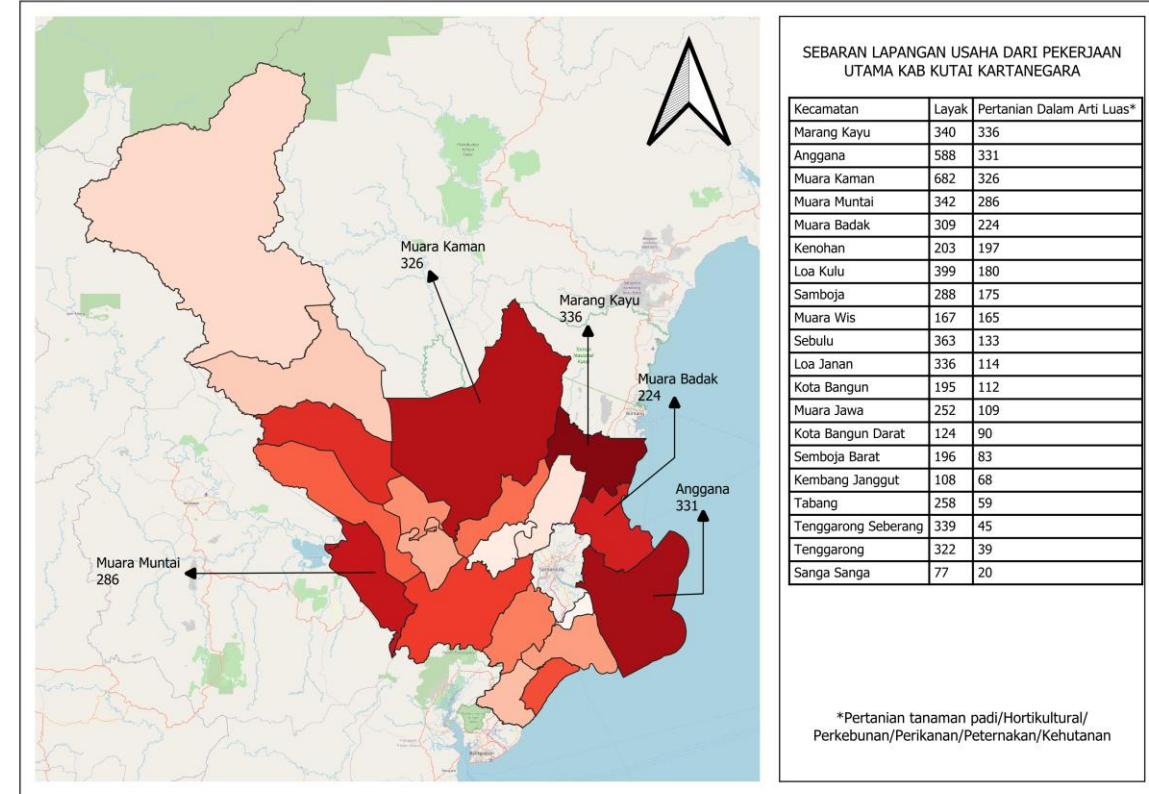


Identifikasi Permasalahan Pendekatan Pekerjaan Utama

Hasil Verifikasi Data P3KE Desil I



Di Sektor Perdagangan dan Jasa, yang paling dominan adalah :
Sebulu, Tgr Seberang, Anggana, Loa Janan, Loa Kulu



Di Sektor Pertanian, yang paling dominan adalah : Marangkayu, Anggana, Muara Kaman, Muara Muntai, Muara Badak

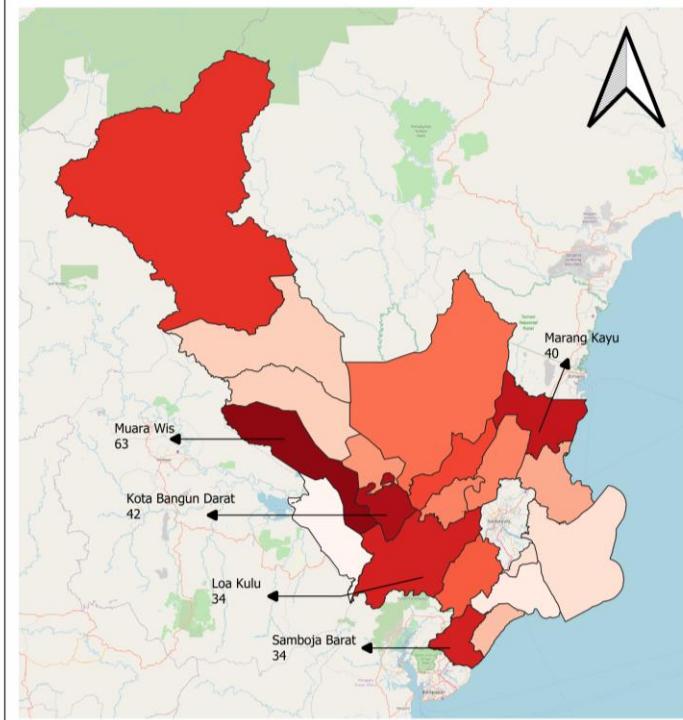
Kesimpulan: Permasalahan Kemiskinan di Kutai Kartanegara bukan hanya masalah akses namun masalah juga dipengaruhi pola distribusi sumber daya ekonomi melalui kesempatan berusaha dan lapangan pekerjaan



Identifikasi Permasalahan Pendekatan Kepemilikan Aset (Perkebunan dan Pertanian)

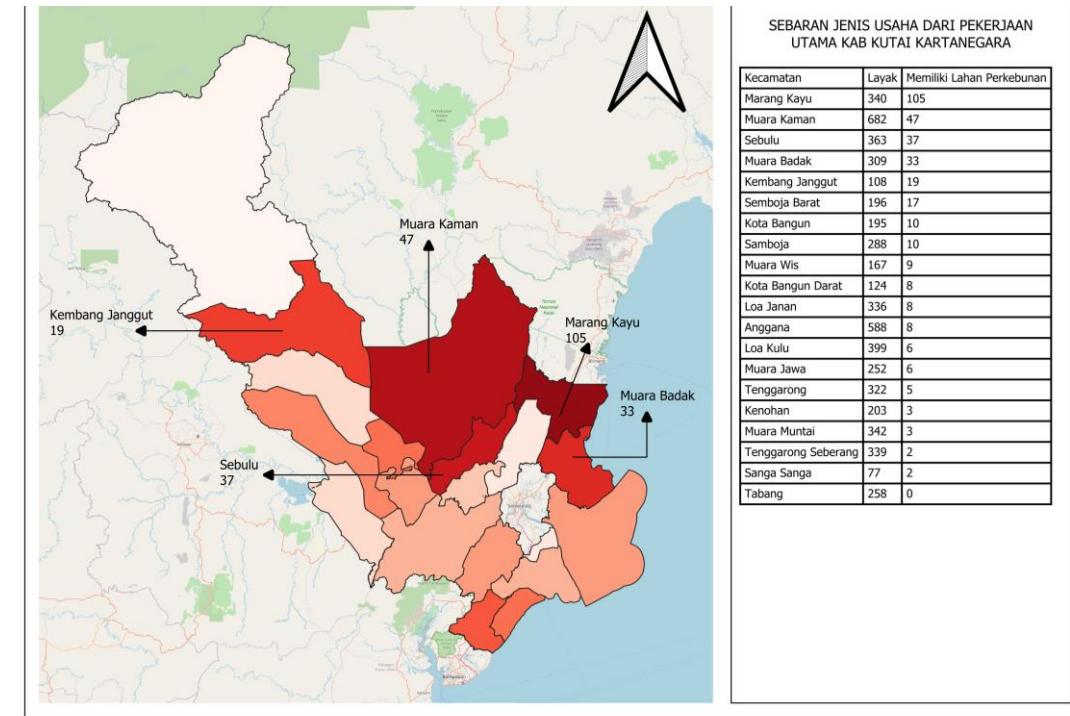
Memiliki Lahan Pertanian Sendiri, Terbanyak di Kecamatan:

Muara Wis, Kota Bangun Darat, Marangkayu, Loa Kulu, dan Samboja Barat



Memiliki Lahan Perkebunan Sendiri, Terbanyak di Kecamatan:

Marang Kayu, Muara Kaman, Sebulu, Muara Badak.



Optimalisasi aset melalui peningkatan kapasitas petani/pekebun diiringi dengan kebijakan pengurangan beban pengeluaran rumah tangga dan subsidi alsintaan perlu menjadi kebijakan khusus di wilayah-wilayah tersebut.



Penutup



Analisis data dan informasi yang saat ini dijadikan sebagai dasar rumusan kebijakan perencanaan tahun 2026, memerlukan penajaman, sinkronisasi dan penyelarasannya dengan kondisi riil lapangan melalui Musrenbang Kecamatan dan Forum Konsultasi Publik;



Perangkat Daerah sebagai pelaksana program dan kegiatan, menyusun rencana kerja tahun 2026, diupayakan memiliki analisis data dan informasi yang valid dan aktual, dalam rangka memperkuat sasaran pembangunan daerah.



Rancangan Awal yang disampaikan pada Forum Konsultasi Publik ini, terus dilakukan penyesuaian dan pemutakhiran berdasarkan atas hasil proses dan perkembangan kebijakan Nasional, Provinsi dan Daerah.

Terima Kasih

